

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan manusia seperti sinar matahari, udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahan bakar fosil dan lain-lain (Siombo, 2011, hlm. 429). Pertumbuhan penduduk yang cepat, perkembangan teknologi dan peningkatan standar kehidupan menjadi penyebab meningkatnya secara signifikan kebutuhan terhadap sumberdaya alam (Kayihan & Tonuk, 2013, hlm. 7). Kebutuhan manusia yang sangat besar terhadap sumber alam berpengaruh terhadap keseimbangan alam dan akibatnya adalah terjadinya kerusakan alam (Pitman & Daniels, 2016, hlm. 1). Kerusakan (krisis) lingkungan yang terus-menerus terjadi selama ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan cara pandang (paradigma) yang mengacu pada etika antroposentrisme (Keraf, 2010, hlm. 49; Sutoyo, 2013, hlm. 195-196).

Paham antroposentrisme memandang posisi manusia berada di atas dan terpisah dari alam serta memiliki hak atasnya, di mana keberadaan bumi dan isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Manusia merupakan pusat di alam ini, manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan bebas terhadap alam dengan mengatasnamakan kebutuhan manusia dan bahkan untuk sifat egoistik manusia (Kortenkamp & Moore, 2001, hlm. 2). Cara pandang ini menyebabkan pola perilaku manusia yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap alam. Apa saja boleh dilakukan manusia terhadap alam sejauh tidak merugikan kepentingan manusia.

Ada beberapa cara berpikir atau paradigma yang mengarahkan manusia pada cara berpikir antroposentrisme. Pendekatan mekanistik-reduksionistik merupakan faktor dari lahirnya paradigma antroposentrisme. Menurut Jeremias (2010, hlm.11), cara pandang ini merupakan warisan dari pemikiran yang berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. Filsuf yang mempunyai pengaruh dalam paradigma mekanistik-reduksionistik diantaranya adalah Rene Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1642-1727), dan Immanuel Kant (1724-1804). Rene Descartes dengan pernyataannya *Cogito, ergo sum*, manusia benar-benar dipahami sebagai makhluk rasional, jiwa lebih penting daripada tubuh yang adalah materi.

Dengan memandang materi lebih rendah, alam semesta yang adalah materi tidak lebih dari sekedar sebuah mesin yang hanya dapat dipahami sepenuhnya dengan menganalisisnya dalam bagian-bagiannya yang terpisah (Keraf, 2014, hlm. 12-13). Selanjutnya Immanuel Kant dengan konsep *Verstand* dan *Vernunft* menggeser peran manusia dari objek menjadi subjek, sehingga manusia sebagai makhluk rasional diperbolehkan secara moral untuk menggunakan makhluk lainnya sebagai penunjang hidup manusia (Chang, 2001, hlm. 42; Russell, 2007, hlm. 922-927).

Dalam seluruh teori tentang dunia materi, paradigma Cartesian-Newtonian sangat deterministik. Organisme-organisme hidup, sama seperti benda mati, diatur oleh hukum-hukum fisika. Konsekuensinya adalah bahwa semua gerak materi ditentukan oleh hukum-hukum fisika (Russell, 2007, hlm. 744-745). Akibatnya adalah, manusia menganggap dapat mengendalikan alam dan memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi alam untuk pemenuhan kebutuhannya serta menganggap alam sebagai bagian yang terpisah dari unsur manusia itu sendiri, sehingga menurut Maryani (2015, hlm. 1), eksplorasi yang berlebihan, apalagi mengabaikan aspek moral dan etika inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Survei yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada tahun 2012 menunjukkan, Indeks Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan Indonesia masih rendah. Rata-rata angka indeks secara nasional adalah 0,57, masih cukup jauh dari angka satu. Angka 0,57 ini merupakan rata-rata dari beberapa indikator, yaitu perilaku konsumsi energi 0,84, perilaku membuang sampah 0,64, perilaku pemanfaatan air bersih 0,41, perilaku pemanfaatan bahan bakar 0,28, perilaku penyumbang emisi karbon 0,59 dan perilaku hidup sehat 0,66. Rendahnya kepedulian lingkungan masyarakat berdasarkan hasil survei ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pendidikan, umur, jumlah anggota rumah tangga, pengetahuan tentang lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan status perkawinan, yang secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku lingkungan masyarakat

Indeks Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan yang rendah dapat menjadi indikator yang menunjukkan bahwa perilaku manusia adalah penyebab utama banyaknya bencana hidro-meteorologis yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di Provinsi Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, pada tahun 2014

banjir merendam ratusan kecamatan di hampir seluruh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil. Aceh Tamiang, Pidie, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh. Banjir telah mengakibatkan ribuan rumah terendam dan mengakibatkan lebih dari 120.966 warga Aceh dari pantai barat, wilayah tengah dan timur mengungsi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014), bencana banjir saat ini sangat rentan terjadi di Aceh karena degradasi lingkungan.

Pada beberapa tahun terakhir ini terdapat berbagai isu dan ancaman berkaitan dengan masalah lingkungan yang disebabkan ulah manusia dan harus diselesaikan secara bersama. Masalah-masalah lingkungan tersebut meliputi masalah pencemaran air, tanah dan udara, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan kumulatif dalam siklus biogeokimia, perubahan iklim global dan menipisnya lapisan ozon (Palmer, 1998, hlm. 35-53; Awatara, 2011, hlm. 105). Menyikapi maraknya bencana alam karena degradasi lingkungan akibat ulah manusia dan menurunnya daya dukung lingkungan, menurut Keraf (2010:8) perlu ada perubahan paradigma atau cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem, karena sebagaimana dikemukakan Wapner & Matthew (2009, hlm. 212) jika paradigma anthroposentrisme terus dipraktikkan, alam dan manusia akan saling menghancurkan karena jika alam rusak maka manusia sendiri yang akan merasakan dampaknya.

Etika biosentrisme dan ekosentrisme merupakan paradigma yang mengkritik etika anthroposentrisme. Dalam biosentrisme yang menjadi pusat pertimbangan adalah kehidupan, alam harus dihargai dan dihormati sebagai entitas yang mempunyai nilai. Ekosentrisme merupakan perluasan dan kelanjutan dari paradigma biosentrisme. Dalam pandangan ekosentrisme perlu adanya pemahaman bahwa adanya keterkaitan antara manusia dengan makhluk lain dan benda abiotik lainnya. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia harus dipahami sebagai makhluk biologis dan ekologis. Menurut Keraf (2010, hlm. 5), manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh dan penuh, tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta.

Salah satu bentuk implementasi etika biosentrisme dan ekosentrisme melalui tindakan praktis adalah perubahan pola pembangunan dalam wujud pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya masyarakat global dalam rangka mengatasi perubahan dan kerusakan bumi yang begitu cepat akibat dari pola pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa dasawarsa yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan melalui laporan WCED berjudul “*Our Common Future*” yang diterbitkan pada 1987 (Kates, dkk., 2005, hlm. 10). Secara teoritis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan pada berbagai sektor pembangunan, diantaranya dalam sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu langkah penting dalam proses mengubah masyarakat (Conde & Sanchez, 2010, hlm. 477). Proses pendidikan diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat global menuju pembangunan berkelanjutan (Sauve, 1996, hlm. 7). Pendidikan Lingkungan Hidup mengintegrasikan nilai-nilai yang melekat pada pembangunan berkelanjutan melalui aspek belajar agar manusia bertanggung jawab dan membuat kenyamanan demi keberlanjutan di masa mendatang (Ozsoy, dkk., 2012, hlm. 3). Pendidikan lingkungan hidup merupakan kerangka kerja utama untuk mewujudkan masyarakat yang peduli tentang lingkungan hidup, keberlanjutan dan perlindungan biodiversitas (Saito, 2013, hlm. 26).

Fokus utama pendidikan lingkungan hidup adalah merubah perilaku peduli lingkungan melalui peningkatan pengetahuan terhadap lingkungan (Pooley & O’Connor, 2000, hlm. 711). Akan tetapi, Pendidikan Lingkungan Hidup saja tidak efektif untuk meningkatkan kepedulian siswa pada lingkungan (Daudi, 2008; Orr, 1992). Hasil penelitian Puk & Behm (2003) di Kanada menunjukkan bahwa pembelajaran lingkungan hidup atau memasukkan materi mengenai lingkungan hidup ke dalam ilmu alam dan geografi memiliki keterbatasan dan tidak efektif untuk meningkatkan literasi ekologis peserta didik. Hal ini kemudian didukung oleh penelitian Legault & Pelletier (2000) di Quebec, Kanada dan penelitian Spinola (2015) di Portugal bahwa pendidikan lingkungan hidup telah menjadikan siswa memiliki tingkat pengetahuan lingkungan yang baik, namun masih perlu perbaikan dalam aspek sikap dan terutama aspek perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam pembelajaran mengenai lingkungan hidup, pendidik biasanya berasumsi bahwa mereka hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, maka tindakan yang bertanggung jawab akan timbul dengan sendirinya (Hungerford & Volk, 1990, hlm. 437). Bagaimanapun, menurut Ozsoy, dkk. (2012, hlm. 3) perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan ilmiah tentang isu-isu lingkungan. Karena itu harus diberikan praktek pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan dan lingkungan belajar harus memberikan siswa kesempatan untuk belajar di luar kelas, mengamati alam, berlatih dan belajar menguji isu-isu tentang lingkungan. Menyikapi permasalahan ini dikembangkanlah program *Eco School*.

Eco School merupakan bentuk implementasi pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terprogram di sekolah, sistem manajemen lingkungan, dan skema penghargaan jangka panjang atas partisipasi sekolah terhadap permasalahan lingkungan hidup (Zhang, dkk., 2009, hlm. 200). Secara internasional program *Eco School* dikembangkan pada tahun 1994 atas dasar kebutuhan untuk melibatkan kaum muda dalam mencari solusi terhadap tantangan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal (*Ontario Eco Schools*, 2014). Program *Eco School* diprakarsai oleh *Foundation for Environmental Education* (FEE) sebagai satu langkah maju dari tingkat lokal untuk mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam manajemen sekolah (Ping, 2003, hlm. 15-16). Program *Eco School* berbasiskan pada prinsip interdisipliner, pendekatan komprehensif dan sistematis, aktifitas, menghubungkan permasalahan lingkungan hidup lokal dengan isu lingkungan hidup global, dan pengambilan keputusan secara demokratis terhadap isu lingkungan dengan mengkombinasikan aspek kognitif, efektif dan estetis (Krnell & Naglic, 2009, hlm. 9).

Dalam program *Eco School* menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga memberikan metode yang efektif untuk mengubah perilaku (Ozsoy, dkk., 2012, hlm. 3). Maka ketika sekolah telah terdaftar untuk mengikuti program *Eco School*, maka seluruh warga sekolah berkomitmen untuk secara aktif terlibat dalam proses pengembangan rencana pembelajaran yang fokus pada permasalahan lingkungan hidup dan memperbaiki lingkungan sekolah (Ward & Schnack, 2003, hlm. 142). Berkaitan dengan tujuan *Eco School*, secara lebih spesifik menurut *Ontario Eco Schools* (2014), “*Eco Schools is an environmental education and certification program for grades K-12 that helps school*

communities develop both ecological literacy and environmental practices to become environmentally responsible citizens and reduce the ecological footprint of schools". Berdasarkan hal ini, penerapan *Eco School* diharapkan dapat mewujudkan warga sekolah yang memiliki literasi ekologis, yaitu warga negara yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan hidup dan mengurangi dampak lingkungan di sekolah.

Kecerdasan ekologis akan membuat manusia dapat menerapkan apa yang dipelajari mengenai akibat aktifitas manusia terhadap ekosistem sehingga dapat mengurangi kerusakan dan hidup lestari di planet bumi (Goleman, 2010, hlm. 37-38). Orang melek ekologis akan memiliki kompetensi praktis yang dibutuhkan untuk bertindak atas dasar pengetahuan dan perasaan. Marchildon (2012, hlm. 4) mengemukakan bahwa literasi ekologis sangat penting, karena:

- *Alienation from nature is contributing to environmental problems*
- *We now are at a critical point with many issues, such as climate change, biodiversity, deforestation*
- *Ecoliteracy is imperative for political and business leaders, as well as in all levels of the education system*

Literasi ekologis sangat penting dalam kehidupan di bumi yang sedang kritis saat ini. Manusia sekarang berada pada titik kritis dengan banyak masalah, seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerusakan hutan. Jika manusia tidak merespon permasalahan ini, akan memberikan kontribusi untuk masalah lingkungan yang lebih parah. Oleh karena itu *ecoliteracy* sangat penting bagi semua kalangan, seperti birokrat, politisi dan pelaku bisnis, serta dalam semua tingkat sistem pendidikan. Keraf (2014, hlm. 148) menyatakan pengembangan pendidikan untuk menumbuhkan literasi ekologis sangat perlu direplikasi di seluruh dunia demi mewujudkan masyarakat berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan menurut Puk & Behm (2003, hlm. 217), literasi ekologis harus menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan dalam upaya menghadapi tantangan serius permasalahan lingkungan di masa depan. Literasi ekologis menurut Barnes (2013, hlm. 2) melengkapi peserta didik dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk menangani masalah lingkungan yang kompleks dan mendesak secara terpadu, dan memungkinkan peserta didik untuk membantu membentuk masyarakat yang berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem dimana mereka hidup.

Guna mempercepat membentuk masyarakat berkelanjutan berdasarkan literasi ekologis menurut Keraf (2014, hlm. 148), setidaknya ada dua upaya yang harus dilakukan,

pertama, literasi ekologis harus dihayati dan dipraktikkan sebagai sebuah pola hidup atau budaya bersama seluruh anggota masyarakat. Kedua, diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mendorong terwujudnya masyarakat berkelanjutan berdasarkan literasi ekologis melalui berbagai kebijakan dan program nyata yang dilaksanakan secara konsisten. Di Indonesia, salah satu program pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan adalah melalui Program Adiwiyata yang dilaksanakan sejak tahun 2006.

Program Adiwiyata dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Melalui Program Adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif, sehingga akan menciptakan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Tim Adiwiyata Nasional, 2012).

Guna mensukseskan Program Adiwiyata, diperlukan keseriusan semua pihak dalam melaksanakan program ini, mulai dari tingkat pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tingkat daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) hingga tingkat sekolah. Di tingkat sekolah diperlukan komitmen yang kuat dari kepala sekolah untuk melaksanakan program Adiwiyata secara serius di sekolah yang dipimpinnya. Peran guru juga sangat penting yaitu sebagai pendidik dan motivator utama untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan melalui program Adiwiyata pada peserta didik. Penelitian Rahmah, dkk. (2014) di SDN Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya menunjukkan bahwa dalam penerapan program Adiwiyat terdapat faktor pendukung internal yakni SDM yang mumpuni dan adanya visi, misi, fungsi serta pengelolaan anggaran yang baik. Faktor pendukung eksternal adanya pihak wali murid dan pemberian Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi tenaga pendidik yang kurang kompak dan faktor penghambat eksternal adalah adanya renovasi gedung yang membuat ketidakberhasilan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata.

Masyarakat, terutama para akademisi dan praktisi lingkungan juga memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan dan meningkatkan kualitas dari program Adiwiyata, baik melalui seminar, lokakarya, workshop maupun melalui penelitian, kajian ilmiah dan penulisan literatur yang berkaitan dengan *Eco School* atau Adiwiyata. Landriany (2014) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Adiwiyata dalam upaya mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat serta instansi lain yang masih rendah. Berdasarkan dua penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program Adiwiyata di tingkat sekolah, dan hal ini harus menjadi perhatian semua pihak apakah perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Adiwiyata.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam 10 tahun terakhir. Walaupun sempat mengalami bencana gempa dan tsunami yang sangat dahsyat yang menghancurkan dan merusak sebagian besar infrastruktur penunjang kota, tapi Kota Banda Aceh dengan cepat dapat bangkit dari keterpurukan berkat adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara masif yang melibatkan puluhan negara pendonor dan organisasi internasional serta nasional. Pesatnya pemulihan pasca bencana dan maraknya pembangunan infrastruktur telah mampu menarik pendatang dari luar kota atau provinsi untuk datang ke Kota Banda Aceh.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2005 atau pasca bencana gempa dan tsunami menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 117.881 jiwa dengan kepadatan 2.899 jiwa/km². Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat pesat menjadi 249.499 jiwa dengan kepadatan 4.066 jiwa/km². Dengan merujuk data ini, dalam beberapa tahun terakhir Kota Banda Aceh akan menghadapi

persoalan serius dalam menghadapi pertumbuhan penduduk. Semakin rendahnya kesejahteraan penduduk di pedesaan dan pembangunan yang kurang merata antara ibukota provinsi dan kabupaten/kota lainnya dapat menjadi faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya urbanisasi ke Kota Banda Aceh.

Salah satu permasalahan serius yang akan muncul akibat pesatnya peningkatan kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah permasalahan lingkungan terutama masalah sanitasi dan sampah. Walaupun saat ini Kota Banda Aceh memiliki infrastruktur drainase perkotaan dan fasilitas pengelolaan sampah yang cukup lengkap, tapi tingkat kesadaran lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh masih rendah. Sebagaimana dikemukakan mantan Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin bahwa pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan, jika tidak ingin terus menerus mengeluarkan biaya besar sebagai konsekuensi perilaku kesehatan masyarakat Kota Banda Aceh yang masih buruk (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2013). Untuk mengatasi hal ini diperlukan kemampuan pemerintah mengajak masyarakat untuk peduli dan menjadi masyarakat berwawasan ekologis. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat berkelanjutan yang berwawasan ekologis adalah melalui lembaga pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu melalui Program Adiwiyata.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sejak tahun 2010 telah cukup aktif dan serius dalam mensosialisasikan Program Adiwiyata ke sekolah/madrasah yang ada di Kota Banda Aceh. Sampai tahun 2014, tercatat telah lebih dari 30 sekolah di Kota Banda Aceh mengikuti Program Adiwiyata, tapi hanya dua sekolah yang telah berpredikat Adiwiyata Nasional dan delapan sekolah berpredikat Adiwiyata Provinsi. Melalui Program Adiwiyata, sekolah diharapkan dapat menjadi *agent of change* bagi lingkungan sekitarnya dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bermakna sekolah harus menjadi model bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta dalam membentuk warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Warga sekolah khususnya peserta didik selanjutnya harus dapat mengaplikasikan dan menularkan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan kepada masyarakat disekitarnya dalam rangka mewujudkan kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya diharapkan sekolah tidak hanya memberi pengetahuan lingkungan kepada

peserta didik, tetapi juga diupayakan agar dapat meningkatkan literasi ekologis peserta didik, yaitu peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap peduli lingkungan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap peserta didik telah dilakukan, diantaranya penelitian Sumarlin (2012) pada siswa di SMP 2 dan SMP 17 Kendari yang berstatus Adiwiyata. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepedulian siswa terhadap pengelolaan lingkungan sekolah melalui program Adiwiyata di SMP 2 Kendari mayoritas dikategorikan sedang, sedangkan di SMP 17 Kendari mayoritas dikategorikan tinggi. Selanjutnya penelitian Jumadil (2015) mengenai penerapan program adiwiyata pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor tentang pengelolaan lingkungan hidup Sekolah Dasar di Kota Kendari menunjukkan bahwa kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotor tentang pengelolaan lingkungan hidup peserta didik Sekolah Dasar yang melaksanakan program Adiwiyata lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang belum melaksanakan program Adiwiyata, tetapi perbedaannya tidak begitu signifikan.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap peserta didik, dapat diketahui bahwa program Adiwiyata telah cukup berhasil dalam meningkatkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotor tentang pengelolaan lingkungan hidup peserta didik, walaupun masih terdapat berbagai kesulitan dan kendala dalam melaksanakan program Adiwiyata, terutama dalam mengaplikasikan komponen-komponen dalam program Adiwiyata. Berdasarkan hal ini penelitian ini menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program Adiwiyata dengan tingkat literasi ekologis peserta didik dan juga bagaimana peran masing-masing komponen Adiwiyata dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik, karena sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang menguji efektifitas dari komponen-komponen Adiwiyata dalam upaya membangun literasi ekologis siswa.

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas Program Adiwiyata dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh. Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan pada beberapa fokus masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimanakah gambaran efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, implementasi kurikulum berbasis lingkungan, budaya sekolah ramah lingkungan, pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan, dan tingkat literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya implementasi kurikulum berbasis lingkungan di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya membangun budaya sekolah ramah lingkungan di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimanakah efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimanakah efektifitas implementasi kurikulum berbasis lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimanakah efektifitas budaya sekolah ramah lingkungan yang dibangun dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh?
7. Bagaimanakah efektifitas pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh?
8. Bagaimanakah efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Program Adiwiyata dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, implementasi kurikulum berbasis lingkungan, budaya sekolah ramah lingkungan, pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan, dan tingkat literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya implementasi kurikulum berbasis lingkungan di Kota Banda Aceh.
3. Mengetahui efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya membangun budaya sekolah ramah lingkungan di Kota Banda Aceh.

4. Mengetahui efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan di Kota Banda Aceh.
5. Mengetahui efektifitas implementasi kurikulum berbasis lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh.
6. Mengetahui efektifitas budaya sekolah ramah lingkungan yang dibangun dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh.
7. Mengetahui efektifitas pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh.
8. Mengetahui efektifitas kebijakan sekolah berwawasan lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik di Kota Banda Aceh.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal implementasi program Adiwiyata untuk menciptakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dalam upaya membangun literasi ekologis peserta didik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi orang tua dan masyarakat, diharapkan dapat memberi wawasan konkret mengenai pentingnya literasi ekologis sehingga dapat melakukan upaya yang komprehensif dalam upaya membangun literasi ekologis anak yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal.
- b. Bagi guru, diharapkan dapat memberi wawasan mengenai program Adiwiyata dan literasi ekologis, sehingga guru tidak hanya aktif dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aktifitas lingkungan hidup di sekolah.
- c. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah, diharapkan dapat memberi wawasan dan bentuk-bentuk tindakan konkret mengenai upaya implementasi program Adiwiyata dalam upaya mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
- d. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Adiwiyata.

- e. Bagi peneliti selanjutnya, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal, pembandingan atau rujukan untuk penelitian lebih lanjut.